

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Februari 2023

Waktu : 09.00-11.00 WITA

Tempat : Ruang Rapat Departemen Ilmu
Sejarah Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin

**PEMBENTUKAN
KABUPATEN MUNA TAHUN 1956-1960**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Humaniora Pada Departemen Ilmu Sejarah Fakultas
Ilmu Budaya**

Universitas Hasanuddin

Oleh:

RAMIN INDRAWAN

NOMOR INDUK POKOK: F061171007

MAKASSAR

2023

SKRIPSI

PEMBENTUKAN KABUPATEN MUNA TAHUN 1956-1960

Disusun dan diajukan oleh:

RAMIN INDRAWAN

F061171007

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada tanggal 15 Februari 2023 dan dinyatakan telah memenuhi sejumlah persyaratan.



**Menyetujui,
Komisi Pembimbing**

Konsultan I

Konsultan II

Dr. Amrullah Amir, S.S., M.A
NIP. 197410162003121001

Drs. Abd. Rasvid Rahman, M.A
NIP. 1960123119910310008

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin**

Prof. Dr. Akin Duli, M.A
NIP. 19640716 199103 1 010

**Ketua Departemen Ilmu Sejarah
Universitas Hasanuddin**

Dr. Ilham, S.S., M.Hum
NIP. 197608272008011 011

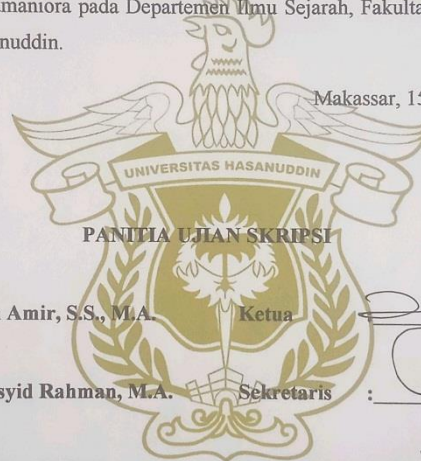
**FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Pada hari Kamis, 15 Februari 2023, Panitia Ujian Skripsi Departemen Ilmu Sejarah telah menerima dengan baik skripsi yang berjudul:

PEMBENTUKAN KABUPATEN MUNA TAHUN 1956-1960

Yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Akhir guna memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 15 Februari 2023



- | | | |
|----------------------------------|--------------|---|
| 1. Dr. Amrullah Amir, S.S., M.A. | Ketua |  |
| 2. Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.A. | Sekretaris |  |
| 3. Dr. Nahdia Nur, M.Hum. | Penguji I |  |
| 4. Andi Lili Evita, S.S., M.Hum. | Penguji II |  |
| 5. Dr. Amrullah Amir, S.S., M.A. | Konsultan I |  |
| 6. Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.A. | Konsultan II |  |

SURAT PERNYATAAN

Nama : Ramin Indrawan

NIM : F061171007

Departemen/Program Studi : Ilmu Sejarah/Strata 1 (S1)

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

PEMBENTUKAN KABUPATEN MUNA TAHUN 1956-60

adalah karya ilmiah saya sendiri. Karya ilmiah ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi (Universitas Hasanuddin). Penulis karya ilmiah ini sesuai dengan kaidah penulisan akademik. Apabila dikemudian hari ternyata di dalamnya terdapat unsur-unsur plagiarisme dan tidak dapat dibuktikan dengan metode historiografi, saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Makassar, 10 Maret 2023

Yang membuat Pernyataan



Ramin Indrawan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan pada Allah SWT, yang Maha Sempurna dan pemilik kesempurnaan, pemilik Ilmu dan Pengetahuan, karena berkat Rahmat dan Hidayah-nya sehingga, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. penyelesaian skripsi ini memang tidak mudah tanpa adanya kerja keras dan ketekunan dari penulis sendiri untuk menyelesaikan. Dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya memerlukan waktu yang tidak sedikit sehingga memerlukan kesabaran dan tekun untuk memperoleh sumber-sumber yang diperlukan guna skripsi ini terselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna mencapai gelar “**Sarjana**” selama menempuh studi dan mendapat ilmu pengetahuan di bangku perkuliahan di Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas hasanuddin.

Oleh sebab itu, penulis menyadari skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik kalau tidak ada bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada **Dr. Amrullah Amir, S.S., M.A** selaku pembimbing pertama dan **Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.Ag** selaku pembimbing kedua yang atas ilmu yang diberikan kepada penulis masukan dan saran terhadap skripsi ini. Beliau telah membimbing penulis dengan sabar sampai dengan tahap akhir skripsi ini dibuat.

Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada informan-informan yang telah memberikan waktu luang kepada penulis untuk berbincang–bincang ada bercerita mengenai keadaan politik Muna pada Tahun 1950-1960-an dan telah

membantu penulis dalam menggambarkan situasi pada masa-masa politik di Muna di tahun-tahun tersebut.

Serta ucapan terima kasih, doa dan serta rasa hormat yang tulus dan ikhlas untuk diberikan kepada :

1. Ibu **Wa Minari** dan Ayah **La Ira** yang telah mendidik, yang tak henti-hentinya mendoakan, dan memberikan perhatian kepada penulis. Untuk ketiga kakakku tercinta **Yani, Harnina, dan Miras Nianti** yang telah memotivasi dan memberikan nasehat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Departemen Ilmu Sejarah di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.
2. Bapak **Dr. Ilham, S.S., M.Hum** sebagai Ketua Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin yang telah membantu penulis selama dibangku perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak **Dr. A. Suriadi Mappangara, M.Hum** selaku Dosen Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin yang telah membantu memberikan saran dan masukan kepada penulis terhadap penulisan skripsi ini.
4. Ibu **Dr. Nahdiah Nur, M.Hum** selaku penasihat akademik penulis yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.
5. Kepada dosen-dosen **Dr. H. Muh. Bahar Akkase Teng, Lc.P., M. Hum, Dr. Amrullah Amir, S.S., M.A., Ph.D, Dr. Ida Liana Tanjung, S.Pd., Dr. Ilham, S.S., M.Hum, M.Hum, Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S, Dr. A. Suriadi Mappangara, M.Hum, Drs. Abd. Rasyid**

Rahman, Dr. Nahdiah Nur, M.Hum, M.Ag, Andi Lili Evita, S.S., M.Hum, Nasihin S.S., M.A, Dr. Muslimin AR. Effendy, M.A, Dr, Banbang Sulistiyo Edy P, M.S yang penulis hormati dan banggakan, menjadi kebanggaan tersendiri untuk penulis menjadi keluarga besar Departemen Ilmu Sejarah Universitas Hasanuddin. Bimbingan dan arahan yang diberikan kepada penulis menjadi kesan yang tak terlupakan untuk penulis.

6. Saudara-saudaraku di “**Palawa 2017**” dan terkhususnya “**Pramoedya 2017**” **Fahmi, Ainun, Vivin, Rustan, Rani, Faridah, Irfan, Rinaldi, Ilham, Risma, Alifka, Budi, Bella, Aya, Arika, Harmina, Ipah, Ismi, Jihad, Khadijah, Yusrah, April, Jannah, Sasa, Anisa dan Anisa Defy** atas keakraban dan kerjasamanya selama ini. Tentu banyak lalu selama menjadi mahasiswa pahit dan manis kita lalu dengan masih memegang penuh rasa persaudaraan sampai kapanpun.
7. Seluruh Keluargaku Himpunan Mahasiswa Departemen Ilmu Sejarah Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin (**HUMANIS KMFIB-UH**), yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu namanya, yang selalu menjadi tempat untuk penulis bertukar pikiran, mendukung penulis dan memberikan semangat motivasi kepada penulis. Juga tempat dimana penulis dibimbing dan dibina mengenai dunia perkuliahan dan organisasi yang tidak dapat ditemui di bangku perkuliahan. Penulis tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih

sebesar-besarnya kepada seluruh keluargaku **HUMANIS KMFIB-UH** atas segala ilmu dan pengalaman yang diberikan.

8. kepada rekan-rekan kerja di **Kedai Bujang** terlebih kepada Owner Kedai Bujang Kak Ari dan Manajemen yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan keleluasaan kepada penulis untuk mengerjakan skripsi di Kedai Bujang. Dan selalu memberikan masukan dan saran kepada penulis terkait penulisan skripsi ini. Juga kepada rekan-rekan kerja yang lain penulis yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
9. Serta kepada semua pihak yang tidak sempat penulis tuliskan satu persatu yang telah memberikan kontribusi yang berarti kepada penulis dalam menyelesaikan studi penulis di Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.

Penulis sadari sepenuhnya akan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk mengarahkan tulisan ini agar lebih baik lagi. Semoga skripsi ini akan berguna untuk kita semua. Amin.

Makassar, 3 Maret 2023

Ramin Indrawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Batasan Masalah	11
1.3. Rumusan Masalah	12
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1.5. Tinjauan Sumber	13
1.6. Metode Penelitian	15
1.7. Sistematika Penulisan	17
BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN MUNA	
2.1. Keadaan Geografis	19
2.2. Potensi Wilayah dan Ekonomi.....	23
2.3. Jumlah Penduduk	26
2.4. Kondisi Sosial Politik	27
BAB III PROSES PEMBENTUKAN KABUPATEN MUNA	
3.1. Latar Belakang Tuntutan Kabupaten Muna.....	32

3.2. Proses Pembentukan Kabupaten Muna	37
3.2.1. Tahap Pertama (Gagasan Pembentukan) Tahun 1954-1956 ..	38
3.2.2. Tahap Kedua (Perjuangan) Tahun 1956-1958.....	44
3.2.3. Tahap Ketiga (Realisasi Pembentukan Kabupaten Muna) Tahun 1959-1960	47
BAB IV TERBENTUKNYA KABUPATEN MUNA	
4.1. Realisasi Kabupaten Muna	50
4.2. Kondisi Sosial Politik Dibalik Pembentukan Kabupaten Muna Sebelum dan Sesudah Terbentuk	59
4.2.1. Kondisi Sosial Politik Sebelum Terbentuk Kabupaten Muna	59
4.2.2. Kondisi Sosial Politik Sesudah Terbentuk Kabupaten Muna	64
BAB V KESIMPULAN	67
DAFTAR PUSTAKA	69
DAFTAR INFORMAN	77
LAMPIRAN	78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penduduk Sulawesi Tenggara menurut Jumlah Angkatan Kerja di atas 10 Tahun	30
--	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Kawedanan Muna	21
Gambar 2.2 Peta Wilayah Daerah Muna Setelah Menjadi Daerah Tingkat II Muna pada Tahun 1959	23
Gambar 3.1 Foto La Ode Abdoel Koedus Bupati Muna Pertama	38
Gambar 3.2 Foto La Ode Pandoe sebelah kiri Raja Muna terakhir	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Memorie van Overgave van de Afdeling Boeton en Laiwoei dan Memorie van Overgave van de Onderafdeling Moena.....	78
Lampiran II : Peta-Peta	80
Lampiran III : Arsip	84
Lampiran IV : Foto	88

ABSTRAK

Ramin Indrawan., Nomor Pokok F061171007, dengan Judul “Pembentukan Kabupaten Muna Tahun 1956-1960”, di bawah bimbingan Amrullah Amir dan Abd. Rasyid Rahman.

Penelitian ini membahas tentang proses pembentukan Daerah Muna Menjadi Daerah Tingkat II setingkat Kabupaten pada tahun 1956-1960. Perjuangan untuk membentuk daerah otonom pada tahun 1950-an merupakan gejolak politik yang terjadi diseluruh daerah di Indonesia. Penulis menggunakan metode penelitian sejarah dalam penelitian ini. Sedangkan sumber-sumber yang penulis gunakan berasal dari berbagai sumber diantaranya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, wawancara, observasi, buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang pembentukan Kabupaten Muna yang tidak lepas dari kondisi politik di Sulawesi Tenggara yang disebabkan menguatnya penuntutan daerah otonom Tingkat I dan Daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara termasuk Daerah Muna. Rentang kendali yang jauh di Makassar dan kekacauan politik pada tahun 1950-1960-an disebabkan oleh Gerombolan DI/TII, menjadi penyebab Daerah Sulawesi Tenggara menggabungkan pembentukan daerah otonom baik setingkat provinsi maupun kabupaten. Sampai pada tahun 1959 diterbitkannya Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi yang menjadi pintu masuk bagi daerah-daerah yang ada di Sulawesi memperoleh daerah otonom setingkat Kabupaten termasuk daerah Muna. Maka pada tahun 1959 secara resmi yang sebelumnya Kewedanan Muna menjadi Kabupaten Muna.

Kata Kunci : Pembentukan, Kabupaten Muna, Kondisi Politik, Daerah Otonom

ABSTRACT

Ramin Indrawan., Identification Number F061171007, with the title "Establishment of Muna Regency in 1956-1960", under the guidance of Amrullah Amir and Abd. Rashid Rahman.

This study discusses the process of forming the Muna Region to become a Level II Region at the Regency level in 1956-1960. The struggle to form an autonomous region in the 1950s was a political turmoil that occurred in all regions in Indonesia. The author uses historical research methods in this study. While the sources that the author uses come from various sources including the Library and Archives Service of the Province of South Sulawesi, interviews, observations, books and journals related to this research. The results of this study indicate that the background to the formation of Muna Regency cannot be separated from the political conditions in Southeast Sulawesi due to the strengthening of the prosecution of Level I and Level II autonomous regions in Southeast Sulawesi, including the Muna Region. The distant span of control in Makassar and the political turmoil in the 1950-1960s caused by the DI/TII gang, became the reason for the Southeast Sulawesi Region to echo the establishment of an autonomous region at both the provincial and district levels. Until 1959 the issuance of Law Number. 29 of 1959 concerning the Formation of Level II Regions of Sulawesi which became the entry point for the regions in Sulawesi to obtain an autonomous region at the Regency level, which meant the Muna area. So in 1959 officially the previous Muna's Wisdom became Muna Regency.

Keywords : Formation, Muna Regency, Political Conditions, Autonomous Region

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembentukan suatu daerah dalam struktur Negara Indonesia, pada dasarnya sebagai subsistem yang dimaksudkan demi meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, salah satunya ditujukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah serta pemerataan pembangunan.¹ Hal inilah yang menjadi dasar adanya suatu pemekaran wilayah agar segala aspek yang menyangkut pelayanan pemerintahan dalam rangka untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini pelayanan publik semakin dipermudah, daerah tersebut juga dapat meningkatkan pendapatannya melalui sumber daya yang tersedia, juga untuk mempercepat pembangunan dalam daerah tersebut.

Pembangunan sangat dibutuhkan untuk menopang keberlanjutan tatanan sosial, ekonomi, dan Budaya masyarakatnya. Keberlanjutan inilah yang menjadi dasar atau tolak ukur keberhasilan pembangunan negara. Faktor politik pun tidak lepas dari pembentukan suatu daerah. Berbagai kebijakan politik yang dibuat untuk mengesahkan dan mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. Isu-isu tentang keadilan dan pembangunan daerah menjadi sangat sentral dalam wacana politik.²

¹Yayan Amroni, *Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Lampung Barat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2010-2016*, (Lampung : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), Hlm. 5

²Ahmad Syafii Maarif, *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*, (Jakarta : Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi, 2012), Hlm. 3

Hal inilah yang menjadi penguat dari proses pembentukan daerah. Baik dari unsur tokoh politik, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuka adat.

Pelaksanaan pembentukan pemerintahan daerah di Indonesia tidak lepas dari perjalanan sejarah. Berbagai dinamika yang terjadi sepanjang pembentukan pemerintahan daerah senantiasa mengalami pasang surut seiring dengan perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia. Berbagai peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur secara khusus tentang pemerintahan daerah bergulir sejak Negara ini berdiri.

Sejarah pembentukan pemerintahan daerah di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah, UU No. 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintah Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, UU NIT No. 44 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Timur, UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, UU No. 6 Tahun 1958 tentang Penetapan “Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1957 (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 9 tentang Perubahan Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah 1956, UU No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi dan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang, (Perpu) No. 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-

Tengah.³ Dalam undang-undang tersebutlah yang menjadi landasan yuridis terbentuknya daerah-daerah di Indonesia.

Sejarah pembentukan pemerintahan daerah di Indonesia beberapa tahun belakangan ini menjadi kajian sejarah yang menarik untuk ditulis. Di Samping setiap daerah ingin mengetahui perkembangan sejarah daerahnya. Ditambah lagi refleksi sejarah sangat perlu dalam melihat perkembangan suatu daerah dari masa ke-masa. Oleh karena itu, sejarah harus dipelajari dalam rangka membangun bangsa menuju cita-cita nasional. Sehubungan dengan itu tema sejarah yang penulis angkat adalah mengenai sejarah pembentukan pemerintahan daerah. Tema ini bagi penulis amatlah penting pengungkapannya, utamanya pada saat sekarang ini.

Pemerintahan daerah pada saat ini telah banyak memberikan dampak kepada masyarakat, terutama pada peningkatan kesejahteraan daerah lewat pemekaran wilayah. Hal ini seiring dengan keinginan beberapa daerah otonom untuk mengembangkan wilayahnya dengan cara membentuk daerah otonom baru. Pengembangan daerah otonom baru, berfokus pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan sosial dan ekonomi juga yang menjadi faktor utama bagi daerah-daerah ingin membentuk daerah otonom baru.

Bertolak dari kesadaran akan pentingnya pengungkapan sejarah pemekaran daerah, utamanya yang menyinggung tentang pemerintahan daerah, yang kemudian berujung pada pemekaran wilayah di berbagai daerah termasuk di

³The Liang Gie, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta : Djambatan, 1958), Hlm. 1-8

Muna.⁴ Sehubungan dengan hal itu, faktor penyebab Muna ingin menjadi Kabupaten berangkat dari kenyataan bahwa rentang kendali antara pusat pemerintahan dengan masyarakat yang ada di Muna sangat jauh yang dipisahkan oleh laut, situasi politik yang tidak stabil membuat lambatnya pemerataan pembangunan, dan lambannya upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).⁵ Konsekuensi akibat dari buruknya situasi politik yang ada di Sulawesi Selatan-Tenggara yang disebabkan oleh pemberontakan DI/TII (1952-1964) yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar membawa dampak politik yang sangat buruk.⁶ Politik aliran yang diterapkan mampu memobilisasi massa dari Sulawesi Selatan-Tenggara menjadikan gerakan ini semakin masif dan besar.⁷

Sehubungan dengan itu, pergolakan politik lokal (Sulawesi Tenggara) pun menjadi masalah yang tak terelakan. Pada Tahun 1950-an dinamika politik yang ada di Sulawesi Tenggara, salah satunya adalah menguatnya tuntutan daerah untuk melepaskan diri dari Provinsi Sulawesi Selatan-Tenggara.⁸ Ada beberapa alasan yang cukup rasional diantaranya keadaan geografis yang terdiri dari kawasan daratan dan kawasan kepulauan yang menjadi garis pemisah antara kedua kawasan tersebut juga potensi daerah dari masing-masing kawasan bisa membiayai rumah

⁴Rustam E. Tamburaka, *Sejarah Sulawesi Tenggara dan 40 Tahun Sultra Membangun*, (Jakarta : Himep, 2003), Hlm. 463

⁵Rustam E. Tamburaka, *Op. Cit.*, Hlm. 478

⁶Sita van Bemmelen, Dkk, *Antara Daerah Dan Negara: Indonesia Tahun 1950-An Pembongkaran Narasi Besar Integrasi Bangsa*, (Jakarta : KITLV-Jakarta - NIOD - Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), Hlm. 196-202

⁷Rustam E. Tamburaka, *Loc. Cit.*, Hlm. 478

⁸La Ode Rabani, Dkk, "Politik dan Ekonomi di Dua Kota: Bau-bau dan Kendari pada tahun 1950-an–1960-an", (Surabaya : *Departemen Sejarah - Universitas Airlangga, Departemen Sejarah - Universitas Gadjah Mada, Mozaik Humaniora Vol 20 (1), 2020*)Hlm. 49

tangganya sendiri serta keadaan politik yang sangat memprihatinkan dan perlu mendapat perhatian.⁹ Dampak realisasi pemekaran Sulawesi Tenggara ternyata membawa persoalan baru dalam jalannya birokrasi pemerintahan pada saat itu.¹⁰

Sepanjang sejarah mencatat perjuangan masyarakat Muna untuk membentuk suatu daerah otonom sendiri. Dimulai pada tahun 1954 sampai pada puncaknya pada 1956, tanggal 26-31 Juli 1956 DPRD-S Kabupaten Sulawesi Tenggara mengadakan Sidang di Kota Raha (Kewedanan Muna) bertempat di gedung Sekolah Tiong Hoa Raha, antara lain memutuskan wilayah administrasi Kewedanan Muna agar dikembalikan seperti pada masa *Onderafdeeling*, yaitu meliputi Pulau Muna seluruhnya.¹¹ Kepulauan Tiworo dan Distrik-Distrik Wakorumba dan Kalisusu yang masih dalam lingkup kekuasaan *Lalina Muna* dengan ibukotanya Raha.¹² Sebelum Belanda menguasai wilayah Muna pada tahun 1906, Muna masuk dalam kontrol Kesultanan Buton dan termasuk pertahanan utama Kerajaan Buton untuk menghalau musuh masuk ke daerah kekuasaan Kerajaan Buton yang disebut wilayah *Barata*.¹³ Berangkat dari sejarah itu, maka

⁹Rustam E. Tamburuka, *Loc. Cit*, Hlm. 338

¹⁰La Ode Rabani, Dkk, *Loc. Cit*, Hlm. 49

¹¹Rustam E. Tamburuka, *Op. Cit*, Hlm. 467. Baca juga Regerings Almanak Voor Nederlandsch-Indië 1942, Eerste Gedeelte Grondgebied en Bevolking Inrichting van Het Bestuur van Nederlandsch-Indie, (Batavia : Koninklijke Bibliotheek, 1942), Hlm. 189

¹²“*Lakina Muna*” merupakan sebutan Gelar yang disematkan pada seorang yang dimandatkan sebagai Raja Muna. J. Couvreur, *Sejarah dan Kebudayaan Kerajaan Muna*, (Kupang : Artha Wacana Press, 2001), Hlm. 54. Baca juga J. Couvreur, *Memorie van Overgave van de Onderafdeling Moena*, (Amsterdam : AFD. Kult. En Phys. Anthropologie Van Het Kon. Instituut Voor de Tropen, 1935), Hlm. 14-16

¹³Dalam Kesultanan Kerajaan Buton memiliki empat *Wilayah Barata* yang meliputi Barata Muna, Tiworo, Kalingsusu, dan Kaledupa yang menjadi basis keamanan dan kestabilan kerajaan dari kekuasaan asing. Sedangkan Barata Muna terbagi menjadi empat *Ghoera* (Distrik) Tongkuno, Katobu, Lawa, dan Kabawo. Susanto Zuhdi, Dkk, *Kerajaan Tradisional Sulawesi Tenggara: Kesultanan Buton*, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1996), Hlm. 8. Baca juga

para tokoh masyarakat Muna yang terus mengeluarkan tuntutan agar Kewedanan Muna dijadikan Daerah Otonom setingkat Kabupaten, yang terjadi juga di Makassar tuntutan tersebut dipelopori oleh Persatuan Rakyat Indonesia Muna (PRIM) di Makassar pada tanggal 5 Agustus 1956, membentuk panitia pembentukan Kabupaten Muna yang ditandatangani oleh La Ode Walanda sebagai Ketua dan La Ode Hatali sebagai sekretaris yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri di Jakarta dan Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.¹⁴

Selanjutnya, pada tanggal 2 September 1956 Panitia Dewan Penuntut Kabupaten Muna di Raha menuntut dan mendesak pemerintah pusat agar merealisasikan terbentuknya Kabupaten Muna dengan Ketua La Ode Hibi dan Sekretarisnya La Ode Tuga masing-masing dan disetujui oleh Raja Muna.¹⁵

Keinginan rakyat Muna menjadi sebuah kabupaten adalah sebuah manifestasi yang digaungkan oleh rakyat Muna termasuk usaha yang sudah lama diidam-idamkan. Rakyat Muna sadar akan ketertinggalan daerahnya dan mengharapkan adanya kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Gelora tuntutan rakyat Muna secara nyata disampaikan kepada Residen Koordinator Sulawesi Tenggara ketika berkunjung di Raha pada tanggal 13 September 1957.

E.P. Bouman, *Memorie van Overgave van de Afdeling Boeton en Laiwoei*, (Amsterdam : AFD. Kult. En Phys. Anthropologie Van Het Kon. Instituut Voor de Tropen, 1935), Hlm. 25-30

¹⁴La Kimi Batoa, *Lintas Sejarah Kerajaan dan Terbentuknya Kabupaten Muna*, (Kendari: UNHALU, 2005), Hlm. 58-61

¹⁵La Kimi Batoa, *Ibid*, Hlm. 58

Pada Tahun 1957 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa wilayah Republik Indonesia dibagi menjadi daerah besar dan kecil yang masing-masing berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Sehubungan dengan undang-undang yang dikeluarkan pemerintah tersebut menjadi landasan atas tuntutan rakyat Muna untuk menjadi Kabupaten makin berkembang, yang perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat antara lain diawali dengan penyampaian Surat Kepala Daerah Sulawesi Tenggara pada tanggal 8 November 1957 kepada Gubernur Sulawesi di Makassar.¹⁶ Gelombang penuntutan pembentukan daerah setingkat Kabupaten juga muncul dari generasi muda Muna yang ada di Makassar. Pada tanggal 8 Februari 1958 terbentuk panitia penuntutan percepatan pembentukan Kabupaten Muna dengan Ketua La Ode Walanda dan sekretaris Ando Arifin. Panitia ini kemudian mengutus delegasinya untuk menghadap Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta. Delegasi ini dipimpin oleh La Ode Muh. Idrus Efendi.¹⁷ Para tokoh ini membawa perubahan besar dalam usaha menjadikan Muna sebagai kabupaten. Usaha-usaha yang mereka lakukan bukan hanya kepentingan pribadi tetapi kepentingan masyarakat Muna secara khusus agar membawa pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.¹⁸

Dari tuntutan tersebut juga dikemukakan beberapa alasan rasional, misalnya keadaan geografisnya dan luas wilayah, jumlah penduduk dan potensi

¹⁶Rustam E. Tamburuka, *Loc. Cit*, Hlm. 465

¹⁷La Kimi Batoa, *Op. Cit*, Hlm, 58

¹⁸Rustam E. Tamburuka, *Loc. Cit*, Hlm. 466

ekonominya yang memungkinkan untuk dikembangkan bagi kesejahteraan masyarakat daerah Muna. Selanjutnya disusul dengan Surat pada tanggal 25 Maret 1958 yang isinya minta kepada Gubernur Sulawesi agar tuntutan rakyat Muna dapat perhatian yang serius, mengingat jangan sampai kelak kekacauan politik dapat mengakibatkan gangguan di Sulawesi Tenggara.¹⁹ Pada tanggal 11 April 1958, Swapraja Buton menyetujui terbentuknya Kabupaten Muna dan mengenai batas-batas akan dibicarakan selanjutnya.²⁰

Pada tanggal 4 Agustus 1958, rakyat Muna menuntut pembentukan Daerah Tingkat II, yang diwakili dengan La Ode Abdoel Kudus di Bau-Bau sebagai penuntut dan penyumbang pertimbangan.²¹ Pada tanggal 15 Oktober 1958, Gubernur Sulawesi menetapkan Drs. La Ode Manarfa sebagai Bupati Kepala Daerah Sulawesi Tenggara.²² Berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Otonom Tingkat II Provinsi Sulawesi yang ditetapkan Tanggal 4 Juli 1959. Selanjutnya, dijelaskan bahwa semua daerah otonom yang lama termasuk Swapraja-Swapraja dalam wilayah Residen Koordinator Sulawesi

¹⁹Rustam E. Tamburaka, *Op. Cit*, Hlm. 465

²⁰Inventaris Arsip Statis Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Tahun 1921-1986, *Kepada Kepala Daerah Sulawesi Tenggara : Surat Tanggal 22 April 1958 tentang menyetujui Terbentuknya Kabupaten Muna Oleh Pihak Swapraja Buton Serta Lampiran*, Asli, Sampul I, (Makassar : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2015). No. Reg. 345

²¹Inventaris Arsip Statis Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Periode Tahun 1921-1986, *La Ode Abdoel Koedus: Pertimbangan (Hakim Pengadilan Negeri Baubau): Surat Tanggal 4 Agustus 1958 Tentang Rakyat Muna Menuntut Kabupaten Otonom Tingkat II*, Asli, Sampul I, (Makassar : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2015). No. Reg. 338

²²Inventaris Arsip Statis Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Periode Tahun 1921-1986, *Tentang (a.n Gubernur Sulawesi Kepada Bagian Politik: Surat Tanggal 15 Oktober 1958 tentang Pengangkatan Residen Koordinator a.n Drs. La Ode Manarfa, serta Lampiran Peninggal*, (Makassar : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2015). No. Reg. 349

Selatan-Tenggara dihapuskan dan kemudian dibentuk 27 Daerah Tingkat II yang termasuk Daerah Otonom Daerah Tingkat II Kabupaten Muna.

Selanjutnya, pada Tahun 1960 Daerah Sulawesi Tenggara dibentuk menjadi 4 Daerah Otonom Tingkat II yaitu, Buton dengan Ibu Kota di Bau-Bau, Kendari beribukotakan Kendari, Muna Ibu Kota di Raha, dan Kolaka Ibu Kota di Kolaka.²³ Realisasi pembentukan tersebut terjadi pada waktu Bupati Kepala Daerah Sulawesi Tenggara Drs. La Ode Manarfa menyerahkan pimpinan pemerintahan berturut-turut yaitu keempat kabupaten termasuk Kabupaten Muna. Sedangkan Kabupaten Muna bupati yang diangkat ialah La Ode Abdoel Koedoes pada tanggal 1 Maret 1960.²⁴ Dan secara resmi Kabupaten Muna menjadi sebuah Daerah Otonom Tingkat II dengan segala perjuangan yang telah ditempuh.

Dari berbagai uraian di atas, maka penelitian ini menggambarkan secara kronologis bagaimana sejarah terbentuknya Kabupaten Muna pada Tahun 1950 – 1960-an awal, yang diwarnai berbagai dinamika politik yang terjadi pada tahun-tahun tersebut, sampai pada usaha untuk pembentukan kabupaten yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat Muna. Dalam hal ini usaha pembentukan Otonom Tingkat II Muna yang mempelopori adalah rakyat Muna sendiri. Penelitian ini diharapkan bisa menemukan perspektif baru dari dinamika politik pemekaran daerah di Sulawesi Tenggara khususnya di Muna. Peneliti juga mengharapkan penelitian ini menjadi sebuah karya tulis Sejarah yang menjadi sumber acuan pada penelitian-penelitian selanjutnya. Sejarah pembentukan Kabupaten Muna menjadi

²³Rustam E. Tamburuka, *Loc. Cit*, Hlm. 467

²⁴B. E. Sabara, *Loc. Cit*, Hlm. 32

bagian penting dalam sejarah pembentukan daerah di Indonesia. Maka dari itu peneliti ingin menggali lebih dalam lagi mengenai sejarah pembentukan daerah di Muna yang berjudul **“Pembentukan Kabupaten Muna Tahun 1956-1960”**.

1.2. Batasan Masalah Penelitian

Penelitian sejarah tentunya harus mengungkapkan fakta secara aktual dan terperinci agar dapat merekonstruksi sejarah secara lengkap. Untuk itu dalam melakukan penelitian harus ada batasan atau fokus yang diambil baik itu lokasi, waktu, dan judul yang jelas. Tentunya dalam sebuah penelitian harus ada batasan spasial dan batasan temporal, agar dalam penelitian ini cakupan yang diambil tidak meluas.

Pada penelitian ini, batasan spasialnya di Kabupaten Muna sebagai fokus kajian penelitian, tujuannya ingin menggali sejarah daerah ini, yang menurut penulis menarik untuk dikaji lebih dalam. Baik itu dari segi dinamika politik yang berimplikasi pada sosial, budaya, dan ekonomi di daerah tersebut. Juga untuk memperkaya pengetahuan sejarah daerah. Sedangkan batasan temporalnya mengapa pada Tahun 1956, karena pada tahun ini dinamika politik yang terjadi berakibat pada keadaan politik yang tidak stabil yang terjadi di Sulawesi Tenggara khususnya di Muna. Berdampak pada penuntutan dari rakyat Muna. Seiringan dengan itu, terbentuknya Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Muna, pada tahun 1959 sampai pada Tahun 1960, terbentuknya Kabupaten Muna berdasarkan UU RI No. 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.

Itulah batasan masalah dalam penelitian ini yang mendasari penulis mengambil penelitian ini.

1.3. Rumusan Masalah Penelitian

Sebuah penelitian harus ada hasil yang akan dicapai atau pokok-pokok bahasan yang menjadi sebuah masalah dalam penelitian. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi tuntutan pemekaran Daerah Tingkat II Kabupaten Muna?
2. Bagaimana kondisi politik dibalik pembentukan Kabupaten Muna?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu penelitian tentunya ada hal yang ingin dicapai agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan. Dari dari hasil yang ingin dicapai ini, tentunya penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut :

- a. Tujuan dari penelitian ini yaitu :
 1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi tuntutan pemekaran Daerah tingkat II Kabupaten Muna.
 2. Untuk mengetahui kondisi politik Muna dibalik pembentukan Kabupaten Muna.
- b. Manfaat dari penelitian ini yaitu:
 1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana.

2. Menambah literatur tentang sejarah politik bagi mereka yang memerlukannya.
3. Dengan adanya tulisan ini dapat menjadi suatu acuan mengenai sejarah terbentuknya Kabupaten Muna Tahun 1956 – 1960

1.5. Tinjauan Pustaka

Penyusunan skripsi diperlukan berbagai sumber, baik primer maupun sekunder, agar untuk menjadi sebuah acuan yang berkaitan dengan penelitian supaya lebih terarah di dalam penulisannya. Diantaranya buku *Sejarah Sulawesi Tenggara dan 40 Tahun Sultra Membangun* ditulis oleh Prof. DR. H. Rustam E. Tamburaka, M.A. et. al. buku ini memberikan informasi mengenai sejarah Sulawesi tenggara dari prasejarah sampai terbentuknya daerah-daerah di Sulawesi Tenggara.²⁵

Dokumen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara. Dalam buku ini memberikan informasi mengenai sejarah Sulawesi Tenggara dan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).²⁶

Pemerintahan Daerah di Indonesia ditulis oleh The Liang Gie. Buku ini memberikan informasi mengenai undang-undang maupun peraturan-peraturan yang mendasari terbentuknya daerah-daerah otonom baru di Indonesia. Buku ini juga menggambarkan tentang sebab terbentuknya pemerintahan di daerah dan

²⁵Rustam E. Tamburaka, *Sejarah Sulawesi Tenggara dan 40 Tahun Sultra Membangun*, (Jakarta : Himep, 2003)

²⁶B. E. Sabara, *Dokumen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara*, (Kendari : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tenggara, 1977)

pembagian tingkat-tingkat daerah dari tingkat ke-I, ke-II, dan ke-III sampai pada pembentukan daerah-daerah.²⁷

Antara Daerah Dan Negara: Indonesia Tahun 1950-An, Pembongkaran Narasi Besar Integrasi Bangsa, ditulis oleh Sita van Bemmelen dan kawan-kawan. Buku ini memberikan informasi mengenai situasi pergolakan politik pada tahun 1950-an. Buku ini juga menyajikan hubungan antara konflik daerah-daerah yang saling berkaitan satu sama lain. Juga pada Tahun 1950-an, menjadi awal berdirinya sebuah negara.²⁸

Politik dan Ekonomi di Dua Kota: Bau-bau dan Kendari pada tahun 1950-an–1960-an, ditulis oleh La Ode Rabani, Bambang Purwanto. Sri Margarana. Tulisan ini memberikan informasi mengenai dua kota yang ada di Sulawesi Tenggara yaitu Kendari dan Bau-Bau. Menggambarkan situasi politik dan ekonomi yang terjadi di kedua kota tersebut pada pada tahun-tahun krusial 1950-an.²⁹

1.6. Metode Penelitian

Sebuah karya tulis ilmiah tentunya dibutuhkan banyak sumber dalam penulisan dan penelitian. Dalam tulisan ini penulis menggunakan beberapa sumber yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Termasuk referensi yang digunakan mulai dari arsip, buku, jurnal, majalah dan lain-lain. Dalam kajian

²⁷The Liang Gie, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta : Djambatan, 1958)

²⁸Sita van Bemmelen, Remco Raben, *Antara Daerah Dan Negara: Indonesia Tahun 1950-An Pembongkaran Narasi Besar Integrasi Bangsa*, (Jakarta : KITLV-Jakarta - NIOD - Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011)

²⁹La Ode Rabani, “Dkk, Politik dan Ekonomi di Dua Kota: Bau-bau dan Kendari pada tahun 1950-dan–1960-an”, (Surabaya : *Departemen Sejarah - Universitas Airlangga, Departemen Sejarah - Universitas Gadjah Mada, Mozaik Humaniora Vol 20 (1),2020*).

sejarah, sejarah identik dengan politik, sejauh keduanya menunjukkan proses yang mencakup keterlibatan para aktor dalam interaksi dan peranannya dalam usaha memperoleh apa, kapan dan bagaimana politik itu dijalankan.³⁰ Untuk itu supaya tidak saling tumpang tindih dengan kajian sejarah lainnya, maka penulis membatasi dengan garapan sejarah politik. Berdasarkan metode penelitian ini terdapat empat langkah yang dilakukan yaitu heuristik atau pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi atau penulisan sejarah.

1. Heuristik (Pengumpulan Data)

Dalam mengumpulkan sumber digunakan sesuai dengan penelitian penulis. Dalam penelitian ini, pengumpulan sumber melalui metode pengamatan atau observasi langsung di Kantor Badan Arsip dan Perpustakaan Sulawesi Selatan dan wawancara. Pengumpulan sumber yang dilakukan oleh peneliti tidak terbatas pada arsip saja, tetapi peneliti ini juga mencari sumber lain seperti buku, jurnal, majalah, dan lain-lain. Untuk menambah referensi peneliti. Dalam penelitian ini ada beberapa sumber arsip yang menjadi latar belakang penelitian ini, diantaranya *Memorie van Overgave van de Afdeeling Boeton en Laiwoei*, *Memorie van Overgave van de Onderafdeling Moena*, *Regerings Almanak voor Nederlandsch-Indie 1942*, dan beberapa sumber arsip mengenai proses pembentukan Kabupaten Muna antara lain, *La Ode Abdoel Koedus: Pertimbangan (Hakim Pengadilan Negeri Baubau): Surat Tanggal 4 Agustus 1958 Tentang Rakyat Muna Menuntut Kabupaten Otonom Tingkat II*, *Kepala Pemerintahan Negeri: Laporan Raha*

³⁰Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogyakarta), Hlm. 173

tanggal 1 Februari 1955 Dalam Wilayah Muna, a.n. Kepala Sulawesi Tenggara, Sekretaris: Surat tanggal 14 Maret 1956, tentang Transmigrasi Lokal Muna, a.n. Resident Koordinator Wilayah Sulawesi Selatan Tenggara: Surat-surat tahun 1955-1956 tentang pernyataan-pernyataan soal status Swapraja dan beberapa arsip lainnya.

2. Kritik Sumber

Setelah mengumpulkan sumber, tahap selanjutnya yang akan dilakukan adalah kritik sumber. Dalam kritik sumber terbagi menjadi dua yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern yaitu kritik yang dilakukan oleh peneliti untuk menyeleksi keaslian sumber, sedangkan kritik intern yaitu kritik yang dilakukan untuk menyelesaikan isi sumber sejarah.

Kritik ekstern peneliti melakukan pengujian atas asli dan tidaknya sumber, berarti ia menyeleksi segi-segi fisik dari sumber yang ditemukan. Bila sumber itu merupakan dokumen tertulis maka harus diteliti kertasnya, tintanya, gaya tulisannya, bahasanya, kalimatnya, ungkapannya, kata-katanya, hurufnya, dan segi penampilan luarnya yang lain. Sedangkan kritik intern lebih menekankan pada kesaksian dalam sejarah merupakan faktor paling menentukan asli dan tidaknya bukti atau fakta sejarah itu sendiri.

3. Interpretasi

Setelah sumber sejarah telah dikumpulkan dan telah dikritik selanjutnya sampai kepada penempatan kelompok yang sesuai dengan tempat dan tahunnya sehingga dapat mengetahui data-data yang akan menjadi sumber penelitian. Dalam

penelitian ini penulis mengkaji tentang bagaimana sejarah pembentukan Kabupaten Muna, dan problem yang ada di dalamnya.

4. Historiografi (Penulisan Sejarah)

Tahapan yang terakhir adalah tahapan penulisan, dalam tahapan penulisan ini telah melewati serangkaian tahapan yaitu pengumpulan sumber, kritik sumber, dan analisis sumber dan sampai pada tahapan penulisan sejarah. Setelah sumber-sumber dan data-data yang telah dikumpulkan maka tahapan selanjutnya adalah penulisan. Dan harapan penulis menyajikan tulisan yang sesuai dengan faktual agar menjadi sumber dan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan.³¹

1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini memiliki bab yang saling berkaitan. Setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, penelitian ini akan disusun lebih lanjut berdasarkan urutan pembahasan seperti di bawah ini:

Bab I sebagai bab pendahuluan yang terbagi atas latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Latar belakang memuat tentang Pembentukan Kabupaten Muna dilihat dari perspektif sejarah. Batasan masalah penelitian memuat tentang periodisasi mulai dari proses pembentukannya sampai pada

³¹Haryati, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Pelembang: Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang, 2017), Hlm. 61-70

terbentuknya Kabupaten Muna. Rumusan masalah memuat tentang pembahasan apa yang penulis angkat untuk dikaji oleh peneliti. Tujuan dan manfaat penelitian berisikan tentang tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini dan juga memperoleh manfaat baik itu penulis maupun pembaca. Tinjauan pustaka memuat referensi dalam penulisan skripsi ini. Metode penelitian memuat tentang langkah-langkah yang ditempuh oleh penulis sampai pada pengumpulan data penelitian. Terakhir adalah sistematika penulisan memuat tentang kerangka penulisan yang penulis coba jabarkan.

Pada bab II akan membahas tentang gambaran umum Kabupaten Muna serta aspek kehidupan sosial budaya, dan ekonomi. Selanjutnya mengenai gambaran umum membahas sejarah singkat Daerah Muna, kondisi geografis, demografis, geohidrologi, agama dan kepercayaan. Serta kondisi sosial, budaya dan ekonomi Kabupaten Muna. Selanjutnya akan dibahas di bab selanjutnya mengenai proses pembentukan Kabupaten Muna.

Pada bab III ini akan membahas mengenai bagaimana proses pembentukan Kabupaten Muna dan usaha-usaha yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat di Muna untuk tercapainya usaha pembentukan Kabupaten Muna. Baik dari meja perundingan sampai aksi para pemuda dan tokoh politik Muna yang dilakukan sampai pada Kabupaten Muna terbentuk. Serta tahap-tahap dalam proses pembentukan Kabupaten Muna dari awal penggaungan sampai pada perealisasi Kabupaten Muna. dalam tahap perealisasi Kabupaten Muna akan lebih dibahas di bab IV tentang terbentuknya Kabupaten Muna.

Pada bab IV ini akan membahas mengenai terbentuknya Kabupaten Muna pada tahun 1959 dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi. Dan bagaimana kondisi politik yang berkejolak dalam terbentuknya Kabupaten Muna. Kondisi politik dalam terbentuknya daerah Muna menjadi Kabupaten ada dua kondisi, sebelum dan sesudah terbentuk menjadi Kabupaten. kondisi politik sebelum Muna menjadi Kabupaten dimulai dari usaha-usaha para tokoh-tokoh politik dalam memperjuangkan pembentukan Kabupaten Muna, suasana selama proses pembentukan sampai pada kondisi keamanan di daerah Muna pra pembentukan. Selanjutnya, kondisi sesudah terbentuknya Kabupaten Muna dimulai dari kondisi para elit politik Muna baik dari partai politik sampai para tokoh bekas Swapraja yang berselisih mengenai siapa yang berhak menjadi Kepala Daerah Muna. Dan kondisi keamanan daerah Muna yang belum banyak berubah yang dikarenakan oleh Gerombolan DI/TII.

Pada bab V ini akan membahas mengenai penjabaran dari bab I sampai bab IV yang kemudian akan ditarik kesimpulan dari seluruh pembahasan. Kesimpulan tersebut, merupakan jawaban dari berbagai rumusan permasalahan yang telah diajukan sekaligus menjadi penutup dalam penelitian ini.

BAB II

GAMBARAN GEOGRAFIS KABUPATEN MUNA

2.1. Keadaan Geografis

Keadaan geografis amatlah penting untuk mendukung mobilitas transportasi, administrasi dan ekonomi wilayah tersebut. Keadaan geografis Pulau Muna diapit oleh Pulau Kabaena di bagian Barat, Pulau Buton di bagian Timur, dan Pulau Sulawesi di bagian Utara. Kalau dilihat dari letak geografis Muna berada di tengah-tengah kawasan pulau. Dimana basis mobilisasinya adalah memakai transportasi laut untuk menghubungkan antar pulau tersebut yang dimana perairannya sangat potensial, tidak hanya transportasi laut, transportasi darat pun sebagai sarana untuk memobilisasi melalui darat.¹

Memobilisasi transportasi darat hal yang utama adalah adanya jalan yang memadai, tanpa adanya jalan yang memadai akan susah memobilisasi melalui jalan darat.² Sehingga masyarakat yang berada di daerah terpencil agak susah untuk menjalankan roda perekonomian dan hal-hal administrasi lainnya, dengan akses yang belum memadai baik akses jalan maupun transportasi, menyebabkan daerah tersebut agak lambat pertumbuhan ekonominya atau tidak berjalan sama sekali. Akibat akses jalan dan transportasi yang tidak memadai apabila terjadi konflik sosial antar masyarakat mengakibatkan penanganannya agak lambat sementara

¹Eddy Yusron, *Fauna Ekhinodermata di Daerah Terumbu Karang di Pulau-Pulau Muna Sulawesi Tenggara*, (Jakarta : Balai Sumber Daya Laut Puslit Oseanografi LIPI, 2003), Hlm. 135

²Inventaris Arsip Statis Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Periode Tahun 1921-1986, *La Ode Abdoel Koedus : Pertimbangan (Hakim Pengadilan Negeri Baubau) : Surat Tanggal 4 Agustus 1958 Tentang Rakyat Muna Menuntut Kabupaten Otonom Tingkat II, Asli*, Sampul I, (Makassar: Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2015). No. Reg. 338

masyarakat untuk mengadu ke pihak yang berwajib dalam hal ini Polisi sangat jauh pusat kota di Raha ataupun di kantor Polisi di Baubau sehingga terjadi keterlambatan informasi.³

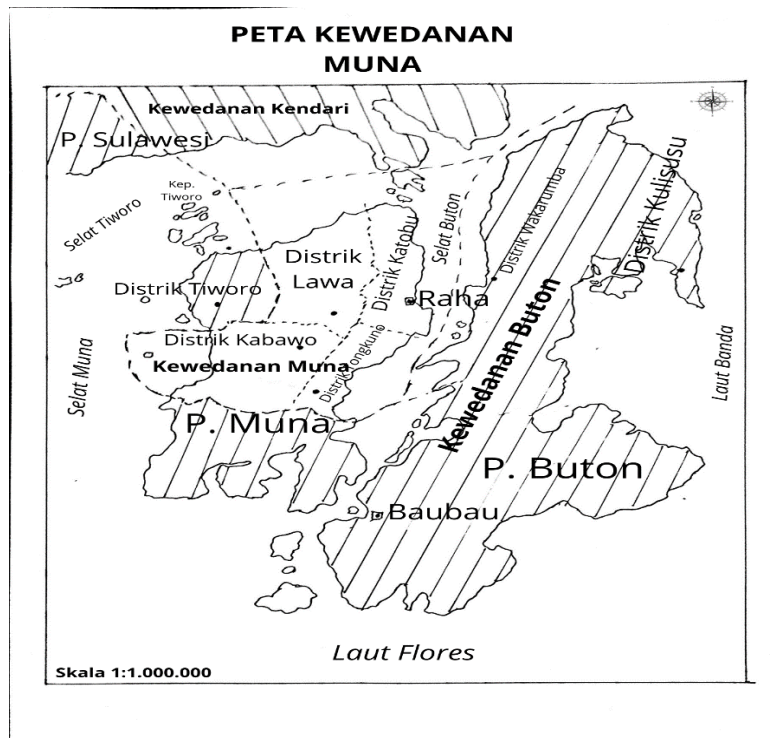
Jauhnya akses termasuk akses kesehatan yang sulit begitu juga perekonomian akibat dari jauhnya pusat perekonomian dan mobilisasi yang susah menyebabkan kendala sulitnya memobilisasi perekonomian, laporan kepolisian, dan kesehatan sehingga masyarakat kesulitan dalam meningkatkan taraf hidupnya.⁴ Apabila ada satu masalah yang menyangkut dengan keamanan dan ketertiban, maka Distrik Tiworo, Wakorumba, dan Kalisusu yang notabene adalah bagian dari Kewedanan Buton. Distrik Tiworo ini kesulitan untuk memobilisasi ke Bau Bau dikarenakan wilayah distrik ini berada di seberang lautan yang sangat jauh jaraknya dengan Kewedanan Buton. Sedangkan Distrik Wakorumba dan Kalisusu itu masih satu pulau tetapi dengan jarak yang sangat jauh lebih dekat Kewedanan Muna maka itu menjadi pertimbangan bagi masyarakat kedua distrik ini ingin bergabung ke wilayah Muna.

Pada tahun 1952, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 1952 tentang Daerah Sulawesi Selatan dibentuk menjadi Tujuh Daerah Swatantra Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. Terbentuknya 7 daerah otonom ini salah satunya Daerah Sulawesi Tenggara, kemudian dibentuk empat administrasi Kewedanan diantaranya Kewedanan Buton, Kewedanan

³Inventaris Arsip Statis Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Periode Tahun 1921-1986, *La Ode Abdoel Koedus, Ibid.*

⁴*Ibid.*

Kolaka, Kewedanan Kendari, dan Kewedanan Muna dapat dilihat pada gambar peta berikut.



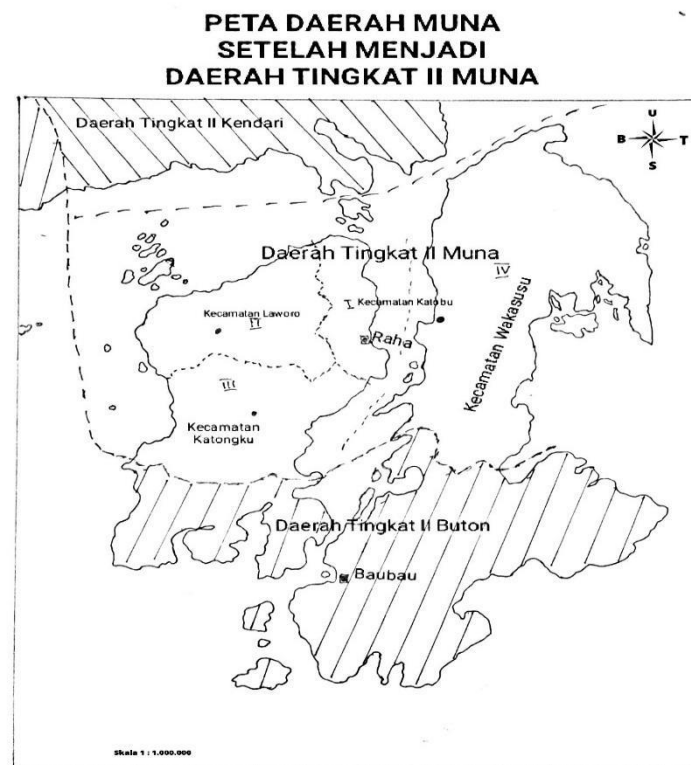
Gambar 2.1 Peta Wilayah Kewedanan Muna Membawahi Empat Distrik (Distrik Katobu, Distrik Lawa, Distrik Tongkuno, dan Distrik Kabawo). Sumber : Rustam E. Tamburaka, Sejarah Sulawesi Tenggara dan 40 Tahun Sultra Membangun, (Jakarta : Himep, 2003)

Pada tahun 1956, Daerah Muna mengalami gejolak politik yang begitu kuat mengenai tuntutan pembentukan daerah otonom setingkat Kabupaten. Gejolak politik ini didasarkan pada rentang kendali Daerah Muna sangat jauh berdampak pada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang lambat. Sehubungan dengan itu, para tokoh masyarakat Muna baik yang tergabung dalam partai politik maupun tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Sehingga, tanggal 5 Agustus 1956, mengeluarkan tuntutan agar Kewedanan Muna dijadikan daerah otonom setingkat Kabupaten di Makassar.

Selanjutnya, Pada tahun 1957 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa wilayah Republik Indonesia dibagi menjadi daerah besar dan kecil yang masing-masing berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Pada tanggal 4 Agustus 1958, rakyat Muna menuntut pembentukan Daerah Tingkat II, yang diwakili dengan La Ode Abdoel Koedus di Baubau sebagai penuntut dan penyumbang pertimbangan. Pada tanggal 15 Oktober 1958, Gubernur Sulawesi menetapkan Drs. La Ode Manarfa sebagai Bupati Kepala Daerah Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan-Tenggara.⁵ Selanjutnya, dijelaskan bahwa semua daerah otonom yang lama termasuk Swapraja-Swapraja dalam wilayah Residen Koordinator Sulawesi Selatan-Tenggara dihapuskan dan kemudian dibentuk 27 Daerah Tingkat II yang termasuk Daerah Otonom Daerah Tingkat II Kabupaten Muna. Selanjutnya, pada tanggal 14 Juli 1959 menyatakan Muna menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II, dengan Bupati pertama bernama La Ode Abdoel Koedus, yang dilantik pada tanggal 2 Maret 1960. Dalam perjalanannya, sebelum terbentuknya Daerah Tingkat II Muna sudah ada beberapa kepala pemerintahan Kewedanan di Muna, yaitu seorang Kepala Pemerintahan Negeri (PKN) atau disebut juga Wedana dari tahun 1949-1959, diantaranya Abdoel Razak tahun (1949-1951, Ngitoung tahun (1951-1954), Pawilowi tahun (1954-1955), HL. Lethe tahun (1955-1956), Supu tahun (1956-1957), Andi Djamaluddin tahun (3 April-11 Juni 1957), F. Latanna (12 Juni- 31 Desember 1957), La Ode Abdoel Koedus tahun

⁵Rustam E. Tamburaka, *Op. Cit*, Hlm. 465

(1958).⁶ Sedangkan wilayahnya terdiri atas empat kecamatan yang meliputi empat bekas Ghoera/Distrik, diantaranya Kecamatan Katobu Ibukotanya raha, Kecamatan Laworo (Lawa-Tiworo) Ibu Kotanya Dandila, Kecamatan Katongku (Kabawo-Tongkuno) Ibukotanya Lasehao, dan Kecamatan Wakasusu (Wakorumba-Kulisusu) Ibukotanya Pure.



Gambar 2.2 Peta Wilayah Daerah Muna Setelah Menjadi Daerah Tingkat II Muna pada Tahun 1959 (Sumber : Rustam E. Tamburaka, *Sejarah Sulawesi Tenggara dan 40 Tahun Sultra Membangun*, (Jakarta : Himep, 2003)

2.2 Potensi Wilayah dan Ekonomi

Potensi wilayah adalah segala sesuatu yang dimiliki suatu wilayah baik Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah

⁶Rustam E. Tamburaka, *Ibid*, Hlm. 465

dimobilisasi maupun yang belum dimobilisasi yang dapat mendukung dan membangun upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk di wilayah yang bersangkutan.⁷ Di setiap daerah memiliki perbedaan potensi, sehingga setiap daerah akan mempengaruhi pembangunan antara wilayah satu dengan yang lainnya. Untuk itu, potensi wilayah sangat penting dalam keberlanjutan pembangunan suatu daerah.⁸ Dalam hal ini untuk mengukur dan mengelola potensi dalam daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan itu, bila dilihat dari potensi wilayah, Muna merupakan wilayah yang potensial, dimana Kewedanan Muna ini di merupakan kepulauan dikelilingi oleh lautan yang berpotensi hasil laut melimpah, seperti perikanan, rumput laut, teripang dan lainnya. Wilayah daratan Muna yang terdiri dari pegunungan dan dataran rendah, menjadi potensi menguntungkan baik pengelolaan perkebunan persawahan dan hasil hutan tampaknya sangat mendukung.⁹

Dalam suatu wilayah, sektor perekonomian amat penting untuk membangun daya serap tenaga kerja. Adanya lapangan pekerjaan baru berarti menurunkan angka pengangguran dalam suatu wilayah. Sebaliknya kurangnya lapangan pekerjaan dalam satu wilayah berarti akan meningkatkan jumlah pengangguran dalam suatu wilayah tersebut. Ketersediaan lapangan pekerjaan berarti membuka sektor ekonomi baru untuk mendongkrak jumlah pengangguran

⁷Ika Sartika, Gatingsih, *Analisis Potensi Wilayah dan Daerah*, (Sumedang : Pustaka Rahmat, 2004), Hlm. 4

⁸Anna Yulianita, Dkk, "Analisis potensi daerah sebagai upaya meningkatkan perekonomian daerah di Sumatera Bagian Selatan", (Palembang : *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 15(1): 60-68, Juni 2017, p-ISSN: 1829-584), Hlm.60-62

⁹La Kimi Batoa, *Lintas Sejarah Kerajaan dan Terbentuknya Kabupaten Muna*, (Kendari: UNHALU, 2005), Hlm. 94-127

semakin sedikit. Secara tidak langsung ketersediaan lapangan pekerjaan menumbuhkan perekonomian dalam suatu wilayah.

Suatu wilayah dapat dikatakan daya serap tenaga kerjanya meningkat atau turun dilihat dari Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), sektor inilah yang menjadi penggerak utama perekonomian dalam suatu wilayah.

Kabupaten Muna merupakan salah satu daerah yang memiliki struktur pencaharian masyarakat yang mengandalkan kepada sektor nelayan dan agraris. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan lahan yang digunakan untuk pertanian dan jumlah penduduk yang bermata pencaharian di sektor pertanian dalam arti luas. Berdasarkan potensi yang tersedia, telah ditetapkan Komoditi Unggulan Kabupaten Muna terdiri dari Rumput Laut, Jagung, Mete, Kakao, Hasil Hutan, dan Pariwisata.

Apalagi penggabungan ketiga distrik ini berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah. Didukung oleh kondisi geografis ketiga distrik ini yang sangat dekat dengan Kota Raha. Sedangkan alasan Distrik Muna Utara, Tiworo, Wakarumba, dan Kulisusu ingin bergabung menjadi Kabupaten Muna dikarenakan jarak tempuh ke Raha lebih dekat dari pada ke Baubau pernyataan ini tertuang dalam surat tertanggal 7 Februari 1957 No. 1/Masjumi/Sul.Tengg., yang ditulis oleh la Ode Abdoel Koedus ditujukan kepada Pengadilan Negeri Baubau yang berbunyi.¹⁰

1. Bakal Ibu Negeri Kabupaten Muna yaitu Raha tersebut adalah jauh lebih dekat letaknya dari daerah-daerah itu dari pada dari Baubau yang hingga ratusan mil itu renggangnya dari tempat2 kediaman raja dari kedua daerah tersebut.

¹⁰Inventaris Arsip Statis Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Periode Tahun 1921-1986, *La Ode Abdoel Koedus, Loc. Cit.*

2. Masih yuridisnya Buton Utara dan Tiworo dalam ikatan administratif dengan Muna Utara dan Raha tsb sebagai ibu negerinya dalam satu Onderafdeeling, yaitu Onderafdeeling Muna berdasarkan keputusan Gubernur de Grote Oots stbld 1940 No. 21 Bijb No. 14 377 tsb;
3. Karena hanya nama Buton Utara dan Tiworo dimasukkan Onderafdeeling Kewedanan Buton sejak Tahun 1947 sebab kenyataan menunjukkan bahwa pelaksanaan *Bertutur Uitvoering* atas kedua daerah itu adalah dilakukan pemerintah Onderafdeeling/Kewedanan Muna di Raha sampai sekarang.
4. Berdasarkan alasan-alasan tersebut pada 2 dan 3 itu tiada akan dirasakan penjelmaan Onderafdeeling Muna itu dalam Kabupaten Muna karena tetapnya nanti ibu negerinya serta tidak adanya pemindahan kekuasaan.¹¹

2.3. Jumlah Penduduk

Kewedanan Muna di tambah ketiga Distrik, Toworo, Wakorumba, dan Kulisusu pada saat itu sebanyak ±150.000 jiwa, yang sebagian besar masyarakatnya mendiami daratan Muna Utara dan Buton Utara. Dari banyaknya jumlah penduduk pada tahun-tahun tersebut menjadi salah satu faktor Muna ingin menjadi daerah otonom setingkat kabupaten.¹² Diantara penduduk Buton Utara dan Tiworo yang berjumlah kira-kira 34.000 jiwa ada kira2 75% terdiri dari suku bangsa Muna dan kira2 25% dari suku bangsa lain, seperti; Kulisusu 20%, Bajo 3%, Bugis ¹¹/₂% dan lainnya ¹/₂%. Jumlah penduduk begitu besar maka, tidak heran rakyat dan tokoh politik menggagas pembentukan Kabupaten Muna.¹³

perkembangan Distrik Katobu yang menjadi pilihan para tokoh masyarakat, dan tokoh politik untuk menjadi ibukota Daerah Otonom Tingkat II yaitu di Raha.¹⁴ Mereka melihat tidak hanya sejarah ini melainkan juga jumlah

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

¹⁴Hayari, Dkk, "Sejarah Kecamatan Katobu Kabupaten Muna(1960-2014)", (Kendari : *HISTORICAL EDUCATION Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah, Edisi Volume 1 No. 1*, 2016), Hlm. 84-85

penduduk yang lebih banyak dibanding dengan distrik-distrik lain di Kewedanan Muna. Raha merupakan kota bentukan Kolonial Belanda sewaktu Belanda masuk ke Sulawesi tahun 1906.¹⁵ Sehingga pengaruhnya menjadikan Raha sebagai pusat perekonomian dan politik pada saat itu. Dan pada pasca kemerdekaan Raha dijadikan sebagai ibukota Kewedanan Muna. Sampai terbentuknya Kabupaten Muna hingga sekarang.

2.4. Keadaan Sosial Politik

Keadaan politik yang tidak stabil akibat kekacauan politik pasca periode awal kemerdekaan sampai pada tahun 1960-an membawa sebuah implikasi terhadap keadaan keamanan Sulawesi dan daerah-daerah di sekitarnya termasuk di wilayah keresidenan Sulawesi Tenggara.¹⁶ Hal inilah yang menjadi sebuah dorongan kuat terhadap masyarakat Muna menanggapi keadaan politik begitu memprihatinkan di daerah tersebut.

Pengaruh politik dan keamanan tidak stabil yang merupakan dampak dari terjadinya pemberontakan DI/TII yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar pada akhirnya sampai ke wilayah Muna. Gerakan ini menjadi penyebab mangkraknya perekonomian di sejumlah daerah termasuk di Muna.¹⁷ Gerakan ini juga menimbulkan banyaknya pengungsi yang berdatangan di daerah akibat penguasaan gerombolan ini. Dampak dari gerakan DI/TII ini membuat kekacauan politik di

¹⁵Hayari, Dkk, *Ibid*, Hlm. 84

¹⁶ La Ode Rabani, Dkk, "Politik dan Ekonomi di Dua Kota: Baubau dan Kendari pada tahun 1950-an–1960-an", (Surabaya: *Mozaik Humaniora DOI 10.20473/mozaik.v20i1.15746 Vol 20 (1) : 39-56*, 2020), Hlm. 39-40

¹⁷Rustam E. Tamburaka, *Sejarah Sulawesi Tenggara dan 40 Tahun Sultra Membangun*, (Jakarta: Himep, 2003), Hlm. 472-473

Sulawesi Selatan dan Tenggara. Selanjutnya di daerah pada tahun 1950-an riak-riak pembentukan otonom baik setingkat provinsi, maupun kabupaten dalam Provinsi Sulawesi menjadi satu isu yang hangat. Pembentukan daerah otonom baru di satu pihak ada yang mendukung tetapi di pihak lain ada juga banyak yang menentang gerakan politik ini.¹⁸ Gerakan politik ini semata-mata untuk merubah dan mengganti model pemerintahan yang masih diperintah kaum tradisional Swapraja.

Hal yang menarik justru pada Sulawesi Tenggara, pada tahun 1957 gerakan-gerakan politik untuk memisahkan diri dari Provinsi Sulawesi kerap terjadi di Sulawesi Tenggara. Tuntutan itu tidak lain untuk membentuk Provinsi sendiri yang dinamakan Provinsi Sulawesi Timur.¹⁹ Sedangkan Alasan utamanya adalah karena konflik di Sulawesi bagian selatan memakan semua sumber pemerintah, sehingga pantai timur Sulawesi terabaikan, dan sebagai akibatnya perkembangan ekonominya terlantar. Produk-produk ekspor terlantar di pelabuhan-pelabuhan kecil karena tidaknya sarana pengangkutan dan fasilitas pelabuhan yang baik.²⁰

Melihat keadaan itu, para tokoh politik mendesak terjadinya suatu pembentukan kabupaten. Agar dapat mengelola dan mengembangkan potensi wilayah nya masing-masing.²¹ Dengan itu timbul kesadaran pada rakyat Muna agar menyatakan dan mendukung pembentukan daerah otonom setingkat kabupaten.

¹⁸Sita van Bemmelen, Dkk, *Antara Daerah dan Negara: Indonesia Tahun 1950-an (Pembongkaran Besar Integrasi Bangsa)*, (Jakarta : KITLV-Jakarta-NIOD-Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), Hlm. 199-201

¹⁹Sita van Bemmelen, Dkk, *Op. Cit*, Hlm. 211

²⁰Sita van Bemmelen, Dkk, *Ibid*, Hlm. 211

²¹Inventaris Arsip Statis Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Tahun 1921-1986, *Kepada Kepala Daerah Sulawesi Tenggara: Surat Tanggal 22 April 1958 tentang menyetujui Terbentuknya Kabupaten Muna Oleh Pihak Swapraja Buton Serta Lampiran*, Asli, Sampul I, (Makassar : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2015). No. Reg. 345

Sehingga muncul koalisi yang mendukung pembentukan tersebut, Raja Muna La Ode Pandu selaku Pemerintahan Swapraja mendukung terbentuknya Daerah Otonom Tingkat II Muna, sehingga merupakan angin segar bagi rakyat Muna dapat menjadi sebuah kabupaten, ditambah tiga distrik Kawedanan Buton yang ingin bergabung ke wilayah Muna apabila menjadi kabupaten.²² Ketiga distrik ini merupakan Distrik Tiworo, Wakorumba, dan Kulisusu yang memiliki masalah yang sama yaitu jarak dan mobilisasi jalan yang tidak memadai.

Ketiga distrik ini memiliki masalah yang sama seperti yang dijelaskan di atas, kurangnya moda transportasi melalui darat maupun laut yang memadai sebagai salah satu faktor penyebab lambannya perekonomian, ditambah jauh dari Ibukota Baubau.²³ Sehingga dalam perjalanannya masyarakat Kulisusu, Wakorumba, dan Tiworo menjual hasil buminya ke Raha karena lebih dekat dengan distrik-distrik tersebut. Selanjutnya dalam hal kondisi politik dan keamanan yang berada di wilayah Muna dan ketiga distrik ini memiliki keadaan yang sama.²⁴ Dalam situasi kekacauan politik akibat dari gerombolan-gerombolan simpatisan DI/TII yang berada pada daerah ini, dapat dilihat dari kutipan penggalan surat La Ode Aboel Koedus.

Bagaimana keadaan Pemerintah dalam Distrik Tiworo seperti dibentangkan pada A sub 5 tersebut, terdapat juga di Buton Utara. Artinya Buton Utara senasib dengan Tiworo tsb. Hanya urusan kepolisian atas daerah itu masuk kekuasaan Polisi Wilayah (Kewedanan) Buton. Akan tetapi sama sekali tidak adanya ataupun sangat kurangnya pengangkutan melalui lautan serta lagi sangat jauhnya dari Baubau, menjadikan daerah itu sangat jarang dikunjungi oleh Polisi dari Baubau hingga sampai sekarang merajalelanya

²²*Ibid.*

²³Rustam E. Tamburaka, *Loc Cit.* Hlm. 472

²⁴Rustam E. Tamburaka, *Op Cit.* Hlm. 465-467

gerombolan-gerombolan di daerah itu. Polisi di Raha tiada mencampuri ressort itu karena daerah kekuasaannya telah ditentukan oleh pihak atasannya, yaitu seluruh pulau Muna dan Pulau-Pulau Tiworo sejak tahun 1956.²⁵

Pertumbuhan angkatan kerja sangat perlu dalam menunjang pertumbuhan suatu daerah. Apalagi pertumbuhan usia kerja semakin meningkat mengakibatkan angkatan kerja semakin banyak.²⁶ Pertambahan angkatan kerja tersebut dapat ditampung dalam lapangan kerja formal, dan sebagian lagi telah berusaha menciptakan lapangan kerja formal, dan sebagian lagi telah berusaha menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri, yang termasuk sebagai pekerjaan sektor informal.²⁷ Namun tidak semua angkatan kerja tersebut dapat tertampung pada lapangan kerja yang tersedia. Yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja, mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan (menganggur). Penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga dan tidak melakukan kegiatan apapun termasuk kategori bukan angkatan kerja yang dijelaskan pada tabel berikut.

Kabupaten/ Kotamadya	Angkatan Kerja			
	Pekerja	Mencari Kerja		Jumlah
		Jumlah	Untuk Pertama Kali	
Kolaka	16.395	2.604	574	18.999
Kendari	61.552	6.595	885	68.147
Muna	42.738	3.174	224	45.912
Buton	101.418	16.588	5057	118.066
Jumlah	222.163	28.962	6740	251.124

²⁵Inventaris Arsip Statis Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Periode Tahun 1921-1986, *La Ode Abdoel Koedus, Loc. Cit.*

²⁶Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, “*Buku Data dan Informasi Produk Unggulan di Kabupaten Tertinggal Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara*”, (Jakarta : Pusat Data dan Informasi, Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan, Pelatihan dan Informasi, 2017), Hlm. 19-20

²⁷*Ibid*, Hlm. 19

Tabel 2.1 Penduduk Sulawesi Tenggara menurut Jumlah Angkatan Kerja di atas 10 Tahun (Sumber : Sensus Penduduk Sulawesi Tenggara Tahun 1971, (Jakarta : Biro Pusat Statistik, 1974).

Pada tahun 1971 dari total penduduk sebanyak 154.024 jiwa dan angkatan kerja yang siap kerja sebanyak 45.912 jiwa di Kabupaten Muna termasuk dalam angkatan kerja dengan rincian penduduk usia kerja yang bekerja sebanyak 42.738 jiwa dan yang mencari kerja sebanyak 3174 jiwa.²⁸

²⁸ Dalam pengambilan data statistik ini, penulis mengambil data tahun 1971, karena penulis belum menemukan data penduduk pada tahun-tahun sebelumnya. Ada data sensus penduduk tahun 1961, tetapi tidak menggambarkan secara rinci hanya menampilkan jumlah penduduk Kabupaten/Kota. Sensus Penduduk Sulawesi Tenggara Tahun 1971, *Op. Cit*, Hlm 160